

**PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN
PENYANDANG CACAT FISIK (*PEOPLE WITH DISABILITY*)
DI BIDANG PARIWISATA**

Rara Sugiarti

LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

The aims of this research are to identify the empirical conditions of tourism job opportunities involving people with disability in the SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) region, identify tourism stakeholder perception on people with disability in the tourism industry, and to formulate a model of empowering people with disability as human resources in the tourism industry. This research was qualitative in nature. Data were collected using site observation, interview and document study. Results indicate that there is still a limited number of people with disability who work in the tourism industry. This is among others due to the lack of commitment and awareness of tourism stakeholders towards people with disability.

Key words: *people with disability, tourism industry.*

PENDAHULUAN

Peristiwa tingkat dunia yang paling mutakhir mengenai penyandang cacat adalah diselenggarakannya panel Sidang Umum (SU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York selama dua pekan pada Bulan Agustus 2006 yang berakhir pada Jumat, 25 Agustus 2006. Dalam panel tersebut akhirnya disetujui konsep konvensi internasional untuk melindungi hak sekitar 650 juta orang cacat di dunia. Selanjutnya, konsep PBB atas - *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* tersebut akan diajukan kepada 192 negara anggota SU dalam sidang ke-61, untuk mendapatkan persetujuan. Konvensi pertama untuk penyandang cacat tersebut rencananya akan mulai berlaku pada 2008 atau 2009. Seluruh negara anggota SU PBB harus menerapkan

konvensi tersebut. Berdasar konvensi tersebut, seluruh negara wajibkan menerapkan peraturan anti-diskriminasi terhadap orang-orang/ penyandang cacat. Selain itu, semua Undang-Undang (UU) yang dinilai berbau diskriminasi terhadap penyandang cacat juga harus disingkirkan.

Dalam konsep Konvensi PBB tersebut termuat poin-poin kemenangan orang cacat, yakni bahwa:

- (1) Seluruh negara wajib menerapkan peraturan anti-diskriminasi orang cacat.
- (2) Semua UU yang dinilai berbau diskriminasi harus disingkirkan.
- (3) Setiap negara wajib menghapuskan segala macam prasangka dan stereotip tentang orang cacat dalam masyarakat.
- (4) Setiap negara wajib menggali potensi warga negara yang cacat, agar kelebihan

- mereka diakui masyarakat luas.
- (5) Fasilitas publik dan transportasi untuk orang cacat harus disediakan.
 - (6) Setiap negara harus memberikan jaminan kepada anak-anak yang menyandang cacat bahwa mereka tidak akan dipisahkan dari orang tua mereka. (Jawa Pos, Minggu 27 Agustus 2006: 5)

World Health Organisation (WHO) memperkirakan bahwa dari sejumlah 600 juta penyandang cacat di dunia, sekitar 400 juta di antaranya berada di negara – negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia (Disability and Development in India, 2003). Di samping itu data demografik tentang manusia lanjut usia (Lansia) juga menunjukkan gejala yang sama yaitu ada peningkatan yang cukup signifikan karena peningkatan taraf hidup. Seperti misalnya di Jepang, 25 persen populasi akan berusia lebih dari 65 tahun pada tahun 2015 dan 50 persen populasi orang dewasa berumur lebih dari 65 tahun pada tahun 2005. Kelompok penyandang cacat fisik dan lansia merupakan kelompok pembayar pajak serta masih memiliki keinginan untuk belajar dan menikmati hari tua dengan cara bepergian (Kaplan, 2004).

Departemen Sosial Republik Indonesia juga menyatakan bahwa tahun 1998, 10 persen dari 190 juta populasi Indonesia adalah penyandang cacat fisik (PWDs). Meskipun begitu, terlepas dari jumlah yang cukup besar tersebut sampai saat ini, utamanya di Indonesia para penyandang cacat belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah maupun kelompok masyarakat yang beruntung. Lebih sering mereka termarginalkan karena kekurangan yang dimilikinya. Bahkan sementara masyarakat menganggap mereka bukanlah kelompok yang potensial dalam bidang pariwisata baik sebagai turis yang potensial maupun sebagai tenaga kerja di lingkungan pariwisata. Hal ini dibuktikan

dengan kurangnya fasilitas untuk penyandang cacat di objek wisata maupun fasilitas yang lainnya yang diperuntukan bagi para penyandang cacat (ESCAP, 2000; Diyah Ernawati & Rara Sugiharti, 2005).

Penyandang cacat merupakan bagian integral masyarakat Indonesia, memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang normal (UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat, UU. No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan, dan PP No. 72/1991 tentang Pendidikan Luar Biasa serta PP. No. 36/1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Penderita Cacat) termasuk dalam hal peningkatan kesejahteraan sasialnya. Namun demikian, masyarakat belum sepenuhnya menghargai penyandang cacat (Abdulrahman Wahid, dalam Kompas 5 Juni 2000). Tenaga kerja penyandang cacat di Indonesia sampai sekarang masih menghadapi berbagai permasalahan yang jauh lebih memprihatinkan dibanding dengan permasalahan ketenagakerjaan orang normal, terlebih di dunia usaha pariwisata atau mereka sebagai tenaga kerja (SDM) nya (Anton Sukarno, 2000).

Di samping itu para pelaku pariwisata juga belum melirik para penyandang cacat sebagai aset yang potensial untuk dipekerjakan di bidang pariwisata untuk peningkatan pembangunan. Penyandang cacat fisik secara umum digambarkan sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki *bargaining power*, kebanyakan datang dari kelompok masyarakat pekerja (menengah kebawah), berpendidikan rendah serta berpendapatan rendah (Shakespeare, 1998). Kebanyakan penyandang cacat hidup secara terpisah dari masyarakat dan hanya berhubungan dengan anggota keluarganya atau pendampingnya (*carer*) dan sering dianggap sebagai beban masyarakat dibandingkan sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak dan

kewajiban yang sama (Imrie, 1999: 464).

Meskipun begitu, Brasil merupakan suatu contoh negara yang berhasil dalam bidang peningkatan kesejahteraan penyandang cacat dimana para penyandang cacat dimotori oleh Edison Passafaro, seorang aktivis penyandang cacat, berhasil mempengaruhi pemerintah sehingga terbentuk *Council for People with Disability* yang bertanggung jawab terhadap perkembangan hak dan kewajiban kelompok ini (Kaplan, 2004). Kelompok ini mempunyai *bargaining power* yang cukup tinggi sehingga industri pariwisata pun mulai melirik mereka untuk dipekerjakan disektor – sektor tertentu dan peraturan pemerintah tentang keharusan melibatkan penyandang cacat dalam angkatan kerja di bidang pariwisata dan bidang lainnya cukup membuat taraf kehidupan mereka menjadi meningkat.

Di Indonesia sendiri, sejak tahun 1998, Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan inisiatif untuk menetapkan peraturan tentang bangunan, sistem transportasi dan jalan yang aksesibel untuk penyandang cacat, meski perkembangan di lapangan tidak begitu menggembirakan. Keterlibatan kelompok penyandang cacat sebagai sumber daya manusia di semua sektor juga belum sesuai dengan yang diharapkan, termasuk di bidang pariwisata. Oleh sebab itu maka penelitian yang mengarah pada pengembangan model pemberdayaan penyandang cacat fisik dalam sektor pariwisata perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat, utamanya di Surakarta sebagai salah satu rujukan nasional rehabilitasi cacat fisik di Indonesia (RC. Prof. Dr. Suharso) (Rara Sugiarti. (2002).

MATERI DAN METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi empirik ketenagakerjaan di sektor pariwisata yang melibatkan penyandang cacat di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), mengidentifikasi persepsi masyarakat (stakeholder) mengenai peluang penyandang cacat di sektor pariwisata sebagai tenaga kerja (SDM), serta membuat model pemberdayaan penyandang cacat fisik sebagai tenaga kerja (SDM) di sektor pariwisata.

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan '*key informants*' dari masing-masing kelompok *stakeholders* atau elemen pemangku kepentingan. Lokasi penelitian ini adalah wilayah eks-Karesidenan Surakarta atau yang dikenal dengan wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi lapangan dan metode simak. Teknik cuplikan (*sampling technique*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data dianalisa dengan menggunakan metode interaktif (Miles & Hubermann, 2003) yang mencakup *data collection, data reduction, data display, dan conclusion/verification*. Analisa tersebut menitikberatkan pada upaya untuk melihat

secara keseluruhan keterlibatan penyandang cacat dalam kegiatan kepariwisataan termasuk untuk mengetahui apakah penyandang cacat telah diberdayakan sesuai dengan derajat kecacatan dan kemampuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi empirik ketenagakerjaan penyandang cacat di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN pada saat ini masih jauh dari harapan dan ketentuan regulasi seperti yang termuat di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 205 Tahun 1999 (KEP-205/MEN/1999) tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk mempekerjakan sedikitnya 1 (satu) orang tenaga kerja penyandang cacat apabila di dalam perusahaan/kantor terdapat 100 (seratus) orang tenaga kerja. Di samping itu, Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang pelibatan tenaga kerja penyandang cacat di berbagai bidang pembangunan daerah belum ada. Demikian pula kepedulian untuk memberikan peluang atau kesempatan kerja yang sesuai kepada penyandang cacat juga relatif rendah. Beberapa tokoh dari elemen pemangku kepentingan berpendapat bahwa penyandang cacat pada saat ini belum memperoleh pekerjaan khususnya di sektor pariwisata mengingat kemampuan mereka terbatas. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penyandang cacat juga terbatas.

Dalam kenyataannya, meskipun jumlah penyandang cacat yang terdapat di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN cukup besar, tingkat keterserapan tenaga kerja penyandang cacat tersebut di lapangan kerja pada saat ini masih sangat kecil, terlebih lagi keterserapan tenaga kerja penyandang cacat di sektor pariwisata. Bidang pekerjaan di sektor pariwisata

yang melibatkan tenaga kerja penyandang cacat di Kota Surakarta masih amat terbatas meskipun Kota Surakarta telah dikenal sebagai kota budaya dan pariwisata. Beberapa jenis pekerjaan yang terkait di sektor pariwisata antara lain adalah panti pijat dan seni kerajinan. Di Kota Surakarta belum terdapat penyandang cacat yang bekerja di instansi pemerintah, terutama di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Hal ini antara lain dikarenakan adanya peraturan tentang persyaratan untuk menjadi pegawai pemerintah bahwa yang bersangkutan harus sehat jasmani dan rokhani.

Di sektor pariwisata lainnya yakni sektor swasta yang antara lain meliputi hotel, restoran, serta biro perjalanan wisata juga tidak terdapat tenaga kerja penyandang cacat. Sebagai contoh, hotel-hotel yang terdapat di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN tidak ada yang mempekerjakan penyandang cacat. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan peraturan yang ada seperti Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 205 Tahun 1999 (KEP-205/MEN/1999) tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, hal ini masih dapat diterima mengingat para pekerja yang terdapat di hotel-hotel tersebut tidak mencapai 100 (seratus) orang.

Data resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah mengenai jumlah tenaga kerja penyandang cacat yang terserap di berbagai lapangan kerja secara umum termasuk lapangan kerja di sektor pariwisata belum tercatat. Ketiadaan data resmi mengenai hal tersebut menunjukkan bahwa kepedulian dan komitmen pihak terkait, khususnya pihak pemerintah yang berkompeten di dalam pendataan masyarakat penyandang cacat, seperti Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi sejenis masih sangat rendah. Ketiadaan data yang dihimpun pemerintah menunjukkan bahwa

komitmen dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat serta memberikan kehidupan dan penghidupan yang layak kepada mereka sangat rendah.

Menurut data resmi dari Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Surakarta sampai detik ini tidak terdapat tenaga kerja penyandang cacat yang beraktivitas di dunia pariwisata. Salah satu penyebab mengapa penyandang cacat belum memasuki dunia kerja atau sektor pariwisata sebagai SDM adalah belum tersedianya kondisi lingkungan kerja yang aksesibel bagi mereka sehingga mereka cenderung bersifat kurang fleksibel dengan kondisi yang ada. Sedangkan untuk daerah lainnya seperti Kabupaten Karanganyar dan Boyolali kondisinya justru lebih tidak baik, artinya hampir tidak ada penyandang cacat yang terlibat secara khusus di sektor pariwisata. Hal ini antara lain disebabkan oleh karakteristik objek dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh daerah tersebut yang sebagian besar merupakan daya tarik alam yang berada di lokasi atau daerah yang sulit dijangkau oleh penyandang cacat dan untuk daya tarik seperti ini diperlukan tenaga kerja yang memiliki kesempurnaan tubuh baik secara fisik maupun mental, artinya tidak cacat daksia, grahita, dan bisu tuli sebab mereka dibutuhkan untuk memandu wisatawan domestik maupun luar negeri meskipun kepandaian mereka sempurna tetapi kurang begitu mendukung faktor kecacatannya.

Di sisi lain pendayagunaan penyandang cacat merupakan kewajiban pemerintah tetapi kalau dalam konteks dunia pariwisata, pendayagunaan tersebut sangat sulit dilakukan karena dalam hal ini diperlukan daya tarik yang kuat dan membutuhkan mobilitas yang tinggi dari diri para penyandang cacat. Meskipun peran mereka dioptimalkan, bukan berarti bahwa pelayanan kepada wisatawan tidak mengalami

kendala. Profesi yang biasa diraih oleh penyandang cacat dalam bidang yang luas saja atau bidang pekerjaan umum saja cukup sulit, apalagi peluang kerja yang khusus di bidang pariwisata. Di Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, belum ada pelatihan atau minat khusus untuk berpartisipasi di sektor pariwisata karena di sini hanya sampai pada tahapan standar tuntutan tenaga kerja yaitu penempaan skill atau keterampilan. Bidang pariwisata menuntut penampilan yang baik dan mobilitas tinggi, sedangkan ukuran layak atau tidaknya penyandang cacat sampai saat ini memang menjadi persoalan.

Anggapan yang beredar di masyarakat pada saat ini sebagian masih menganggap bahwa kecacatan itu merupakan kutukan dari Tuhan serta merupakan aib keluarga. Dengan demikian, masih terdapat keluarga yang berusaha ‘menyembunyikan’ anggotanya yang menyandang cacat karena mereka merasa malu. Masyarakat masih mempertanyakan untuk apa penyandang cacat harus bersekolah dan mengikuti pendidikan/pelatihan (diklat) sebagai salah satu bentuk rehabilitasi, kalau akhirnya mereka tidak bekerja. Sementara masyarakat lain memiliki persepsi atau pandangan yang keliru tentang penyandang cacat, yakni bahwa penyandang cacat tidak memiliki potensi dan akan menjadi beban dalam bekerja. Persepsi seperti ini perlu diluruskan dan pada saat diperlukan adanya upaya untuk mencari alternatif agar masyarakat memiliki rasa peduli atau kepedulian terhadap penyandang cacat agar penyandang cacat memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi sumber daya manusia sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Bagaimana pun keadaan atau kondisinya,

kelompok masyarakat penyandang cacat masih mempunyai potensi yang dapat dioptimalkan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya melalui proses-proses khusus. Apabila diarahkan dan dibimbing serta dibina secara tepat mereka memiliki potensi untuk menjadi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari aset nasional. Namun demikian ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab, yakni apakah masyarakat sudah mengakui kesamaan hak penyandang cacat sebagai anggota masyarakat. Masalah ini perlu mendapatkan pemecahan yang realistik, sehingga tidak hanya memunculkan regulasi atau aturan-aturan formal namun belum mengikat sanubari masyarakat luas sehingga regulasi tersebut tidak pernah diimplementasikan dan tidak ada sangsi yang jelas bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan tersebut. Secara formal kita telah memahami bahwa secara nyata dan jelas UUD 1945 telah menyebutkan kesejarahan dan kesamaan hak serta kewajiban sebagai warga negara, yang di dalamnya tidak memandang apakah warga negara sebagai anggota masyarakat tersebut menyandang cacat atau tidak.

Untuk itu diperlukan kerja sama antara pihak-pihak terkait seperti dinas pariwisata, PRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dan bidang-bidang atau perusahaan jasa pariwisata serta objek-objek wisata seperti Karaton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan sebagainya, untuk memberikan peluang kerja dan meningkatkan peran serta karir penyandang cacat khususnya di dunia pariwisata.

Dari hasil pengamatan selama berpuluhan puluh tahun dapat dilihat bahwa hampir seluruh pencari kerja yang memproses lamarannya melalui dinas tenaga kerja di wilayah Subosukawonosraten merupakan anggota masyarakat yang tidak menyandang cacat. Dalam program kerja yang pernah dilaksanakan yang

menyangkut penyandang cacat adalah pemberian modal kepada mereka yang didanai langsung oleh APBD masing-masing daerah kabupaten/kota dan itu pun hanya diperuntukkan bagi penyandang cacat yang sangat terbatas jumlahnya. Sebagai persyaratannya, mereka diharuskan membuat proposal dan sudah membuka atau memiliki suatu usaha. Alokasi dana yang dialokasikan dari APBD diperuntukkan bagi pembelian atau pengadaan fasilitas penunjang kerja mereka seperti kursi, meja, almari dan lain-lain.

Bidang-bidang karier, termasuk di sektor pariwisata, yang dapat dipilih atau ditekuni oleh penyandang cacat relatif lebih terbatas karena jenis dan derajat kecacatan atau keterbatasan mereka. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak bisa digunakan sebagai alasan bagi penyandang cacat itu sendiri untuk menjadi orang yang selamanya tergantung pada orang lain. Justru karena kondisinya yang serba terbatas itulah kiranya dapat dijadikan pemicu dan pemicu oleh penyandang cacat untuk lebih giat berkreasi, berinovasi dan berusaha sehingga kecacatannya justru menjadi motivasi dalam rangka mewujudkan kemandirian hidupnya. Program kemandirian dengan demikian menjadi sangat penting bagi penyandang cacat. Untuk menunjang kemandirian bagi penyandang cacat maka kewirausahaan perlu dijadikan sebagai salah satu pilihan karier, termasuk kewirausahaan di sektor pariwisata.

Program kewirausahaan untuk menunjang dunia pariwisata diberikan secara khusus dalam suatu kegiatan pelatihan kewirausahaan pada waktu tertentu setelah mereka menyelesaikan pendidikan keterampilan. Materi yang diberikan selama pelatihan sebaiknya dikususkan pada materi kewirausahaan, dan tidak dicampur dengan materi-materi lain. Dengan demikian pelatihan ini menjadi lebih efektif bagi kegiatan

teori maupun prakteknya. Untuk memberikan materi pariwisata diperlukan tambahan waktu khusus sehingga bekal teori maupun praktek yang didapatkan oleh penyandang cacat semakin lengkap.

Pada saat ini sebagian besar pelaku bisnis pariwisata di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN belum banyak memberikan perhatian kepada kebutuhan penyandang cacat untuk memperoleh pekerjaan di sektor pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah tenaga kerja penyandang cacat yang terserap di sektor pariwisata. Selama ini para pelaku pariwisata merasa bahwa tidak ada penyandang cacat yang melamar pekerjaan di perusahaan mereka. Dengan demikian tentu saja di perusahaan mereka tidak terdapat tenaga kerja penyandang cacat. Menurut mereka hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi kepada penyandang cacat mengenai kesempatan atau peluang kerja yang memungkinkan mereka untuk melamar pekerjaan.

Kesempatan kerja yang belum seimbang bagi penyandang cacat tersebut dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain adalah terbatasnya informasi mengenai kesempatan atau peluang pekerjaan di sektor pariwisata bagi penyandang cacat, terbatasnya kesempatan kerja bagi penyandang cacat sebagai SDM di sektor pariwisata, rendahnya kepedulian para pemangku kepentingan di sektor pariwisata terhadap penyandang cacat dan kemampuan atau kapabilitas mereka, kurangnya sarana yang terkait dengan sektor pariwisata yang dapat memberikan kemudahan (aksesibel) kepada penyandang untuk melakukan pekerjaan atau bekerja di sektor pariwisata, seperti bekerja di hotel, rumah makan, biro perjalanan wisata, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Permasalahan lainnya adalah bahwa

pengetahuan dan pemahaman stakeholder pariwisata mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penyandang cacat masih relatif rendah. Di samping belum menyediakan kesempatan dan informasi yang memadai untuk penyandang cacat mengenai peluang kerja di perusahaan atau jasa pariwisata, stakeholder swasta juga belum memfasilitasi kebutuhan kelompok penyandang cacat untuk mengakses informasi tentang jenis pekerjaan dan persyaratan yang dibutuhkan serta menciptakan langkah awal untuk menumbuhkan perhatian kepada penyandang cacat dengan program-program sosialisasi melalui kampanye dan publikasi.

Kemudahan tersebut antara lain berupa fasilitas umum yang aksesibel termasuk ketersediaan transportasi umum yang sesuai dengan kondisi mereka serta ketersediaan fasilitas lainnya seperti *ramp* dan *hand rail* menuju ke lokasi kerja di suatu gedung, lift dengan pintu lebar yang cukup untuk kursi roda di lokasi perkantoran perusahaan atau super market yang terdapat di gedung berlantai banyak, serta fasilitas terkait lainnya. Namun demikian di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh penyandang cacat tersebut belum tersedia. Dengan demikian kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di sektor pariwisata juga belum terwujud.

Kebutuhan tenaga kerja penyandang cacat lainnya berupa kebutuhan akan ketersediaan informasi mengenai berbagai peluang kerja di sektor pariwisata, serta kebutuhan untuk dapat sampai di tempat kerja dengan mudah, aman dan nyaman. Berbagai keterbatasan tersebut berakibat pada tidak terciptanya peluang yang seimbang bagi penyandang cacat dalam hal mendapatkan kesempatan kerja guna memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak. Selain itu para

penyandang cacat selalu dihantui oleh perasaan cemas setiap saat mereka ingin melakukan mencari lapangan pekerjaan atau peluang kerja. Dengan demikian pada saat ini mereka merasa belum mendapatkan kesempatan yang seimbang dengan anggota masyarakat lain yang tidak memiliki kecacatan dalam memenuhi berbagai kebutuhan termasuk melalui bidang pekerjaan di sektor pariwisata.

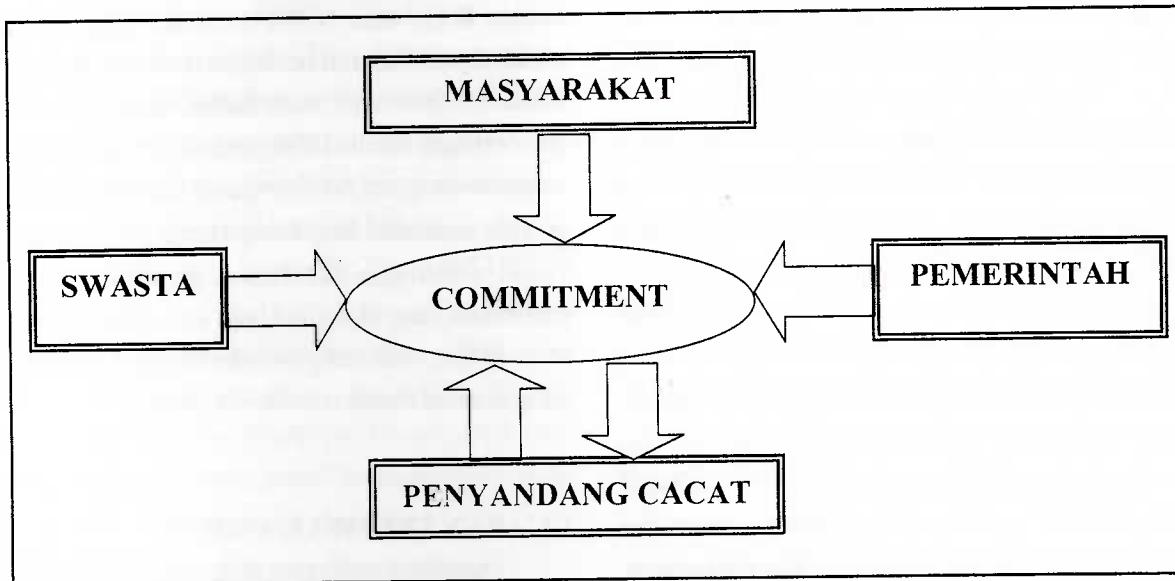
Kebutuhan penyandang cacat lainnya adalah tersedianya aksesibilitas lingkungan kerja. Menurut pengamatan mereka selama ini masih banyak tempat kerja yang belum menyediakan fasilitas yang aksesibel kepada penyandang cacat yang akan bekerja di lokasi tersebut. Apabila pembangunan pariwisata akan diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan semua kelompok masyarakat termasuk penyandang cacat maka fasilitas yang aksesibel tersebut harus sekaligus dilihat dari dua sisi kepentingan yang terpadu, yakni fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang cacat sebagai wisatawan dan kebutuhan penyandang cacat sebagai sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata.

Di samping itu, menurut mereka diperlukan upaya untuk menggugah kepedulian *stakeholder* pariwisata baik pemerintah, swasta maupun masyarakat terhadap kebutuhan mereka, antara lain dengan cara melibatkan pihak penyelenggara pendidikan formal dan non-formal bidang pariwisata, seperti sekolah menengah pariwisata, akademi pariwisata, dan program-program diploma pariwisata maupun kursus-kursus di bidang jasa kepariwisataan, dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyandang cacat mengenai kepariwisataan dan peluang pekerjaan di sektor

pariwisata yang dapat diraih serta memberi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan karakteristik dunia kerja pariwisata sebagai salah bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga perlu melibatkan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang kecacatan termasuk LSM penyandang cacat, dinas sosial serta instansi-instansi yang berada di bawah naungan Rehabilitatie Centrum Prof. Dr. R. Soeharso, dsb, untuk memberikan pelatihan dan kursus atau pemberian bekal keterampilan yang diperlukan oleh bidang-bidang pekerjaan di sektor pariwisata.

Berdasarkan temuan yang diperoleh di kabupaten/kota yang terdapat di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN keterbatasan akses penyandang cacat terhadap peluang kerja yang tersedia, khususnya peluang kerja di sektor pariwisata banyak disebabkan oleh belum adanya kepedulian atau komitmen yang solid dari semua komponen stakeholder termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat meskipun sebenarnya sudah ada banyak peraturan dari berbagai tingkatan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan sebagainya. Oleh karena itu hal yang terpenting di dalam perumusan model pemberdayaan penyandang cacat sebagai tenaga kerja di bidang pariwisata adalah model yang menggarisbawahi pentingnya mengedepankan komitmen dari seluruh komponen pelaku atau stakeholder yang berkaitan dengan penyandang cacat dan pariwisata. Model yang dirumuskan dalam penelitian ini diberi nama Model Pembangunan Komitmen (*Commitment Building Model*) yang dapat dilihat pada Diagram 1.

Diagram 1: Model CBM (*Commitment Building Model*) yang merupakan Model Pemberdayaan Penyandang Cacat sebagai Tenaga Kerja (SDM) di Sektor Pariwisata.



CBM merupakan model yang dirumuskan untuk memberikan peluang atau kesempatan kerja kepada penyandang cacat di sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat. CBM menekankan adanya komitmen dari semua pihak terkait yang merupakan stakeholder yang bertanggung jawab kepada upaya mewujudkan kesamaan hak bagi penyandang cacat untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak sebagaimana anggota masyarakat lainnya yang tidak menderita cacat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kondisi empirik ketenagakerjaan penyandang cacat di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN pada saat ini masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya komitmen dan kepedulian stakeholder untuk memberikan peluang atau kesempatan kerja yang sesuai kepada penyandang cacat guna memperoleh kehidupan dan penghidupan

yang layak. Elemen stakeholder yang antara lain merupakan unsur pemerintah berpendapat bahwa sampai pada saat ini jarang terdapat penyandang cacat yang memiliki antusiasme yang tinggi untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan yang dalam hal ini diadakan oleh Dinas Pariwisata, (Disparta). Kursus atau pelatihan yang diselenggarakan pada umumnya menyangkut ketrampilan dalam dunia pariwisata, seperti teknik memandu wisata. Khusus untuk kasus yang terdapat di Kota Surakarta jarang terdapat penyandang cacat dan bahkan tidak ada penyandang cacat yang mendaftar dan terlibat dalam aktivitas pariwisata. Salah satu contoh adalah di Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari. Selama ini tidak terdapat tanda-tanda atau indikasi yang menunjukkan bahwa penyandang cacat ikut terlibat dalam aktivitas pariwisata yang terdapat di lokasi tersebut, meskipun dunia hiburan di tempat ini merupakan salah satu terobosan dan pintu masuk bagi para penyandang cacat tersebut. Sampai hari ini tercatat bahwa kondisi THR Sriwedari selama

dipegang oleh pihak swasta dan gedung Wayang Orang Sriwedari oleh Pemerintah Kota Surakarta (Disparta), tidak tampak peran dan aktivitas penyandang cacat di dalamnya.

Berdasarkan temuan yang diperoleh di kabupaten/kota yang terdapat di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN keterbatasan akses penyandang cacat terhadap peluang kerja yang tersedia, khususnya peluang kerja di sektor pariwisata banyak disebabkan oleh belum adanya komitmen yang solid dari semua komponen stakeholder termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat meskipun sebenarnya sudah ada banyak peraturan dari berbagai tingkatan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan sebagainya. Oleh karena itu hal yang terpenting di dalam perumusan model pemberdayaan penyandang cacat sebagai tenaga kerja di bidang pariwisata adalah model yang menggarisbawahi pentingnya mengedepankan komitmen dari seluruh komponen pelaku atau *stakeholder* yang berkaitan dengan penyandang cacat dan pariwisata. Model yang dirumuskan dalam penelitian ini diberi nama Model Pembangunan Komitmen (*Commitment Building Model*).

Berdasarkan berbagai keterbatasan yang dialami oleh penyandang cacat sebagai tenaga kerja di sektor pariwisata,, terdapat beberapa hal yang menurut para stakeholder pariwisata perlu dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, yaitu dengan mempertemukan stakeholder dan pihak-pihak terkait baik pihak pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat untuk duduk bersama dan memikirkan upaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka, mensosialisasikan program-program

untuk mengakomodasi dan memfasilitasi serta memenuhi kebutuhan penyandang cacat sebagai tenaga kerja atau SDM di sektor pariwisata melalui publikasi di berbagai media termasuk seminar/konferensi, surat kabar, majalah, radio dan berbagai media lainnya serta mensikronkan program-program pembangunan pariwisata yang bersifat aksesibel bagi tenaga kerja penyandang cacat sehingga terwujud pembangunan pariwisata yang aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, baik yang menderita cacat maupun yang normal (tidak menderita cacat).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian mengenai pengembangan model pemberdayaan penyandang cacat fisik (*people with disability*) di bidang pariwisata ini dapat terselenggara atas inisiatif, perhatian, fasilitasi dan dukungan dana dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Provinsi Jawa Tengah melalui program Riset Unggulan Daerah (RUD) tahun anggaran 2006. Penelitian mengenai penyandang cacat dan lansia serta kelompok masyarakat lainnya yang memiliki keterbatasan sampai saat ini belum banyak mendapatkan perhatian. Oleh karena itu perhatian dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap terselenggaranya penelitian ini merupakan titik awal (*starting point*) untuk mewujudkan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada semua orang (*for all*). Untuk itu kami, tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (PUSPARI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BALITBANG Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Sukarno. 2000. Studi perbedaan ketampilan mahasiswa dalam pembinaan karir penyandang cacat. Surakarta: UNS (Laporan Penelitian).
- DISABILITY DEVELOPMENT IN INDIA. 2003. Available online <http://www.world.bank.org>. Accessed 17 July 2005.
- Diyah Ernawati & Rara Sugiarti. 2005. *The Development of an Accessible Tourist Destination Model for People with Disability in Indonesia*” Tourism Recreation Research (Vol.30 (3), 2005).
- ESCAP. 2000. *Barrier-free tourism for people with disabilities in the ESCAP Region*. A paper presented to Asia-Pacific Conference on Tourism for People with Disabilities, Bali, Indonesia 24 – 28 September 2000
- Imrie, Rob. 1999. The role of access groups in facilitating accessible environments for disabled people. *Disability & Society*, Vol. 14, No. 4, 1999, pp. 463 – 482.
- Jawa Pos. 2006. Seluruh Negara Wajib Lindungi Orang Cacat. Artikel (Minggu 27 Agustus 2006: 5).
- Kaplan, D. 2004. *Universal Design for Disable People Draws International Support. A Report on International Conference on Universal Design*, “Design for the 21st Century”, December 7 – 11, 2004. Rio de Janeiro, Brazil.
- Miles M.B., And Hubermann. 2003. *Qualitative Data Analysis: A sourcebook of new methods*. Beverley Hills, C.A: Sage Publication.
- Rara Sugiarti. 2002. *Model Pengembangan Pariwisata yang Aksesibel Untuk Penyandang Cacat dan Kelompok Masyarakat Lain yang Memiliki Keterbatasan Kemampuan Fisik*. Unpublished Research. Universitas Sebelas Maret
- Shakespeare, T. 1998. Cultural representations of disabled people. *Disability & Society*, Vol. 9(3), pp. 283 – 300.